

**EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN YAYASAN
VESTA INDONESIA BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.45**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata-1

Di Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha



Nama : Alfanzafar Abdurachman

Nomor Mahasiswa : 195217347

Jurusan : Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam Referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 September 2019

Penulis

Alfan Zafar Abdurachman

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi

**Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Vesta Indonesia Berdasarkan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45**

Nama : Alfanzafar Abdurachman

Nomor Mahasiswa : 195217347

Jurusan : Akuntansi

Yogyakarta, 17 September 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing

Dra. Sulastiningsih, M. Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Dipertahankan di Depan Panitia Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Yogyakarta dan Diterima Untuk Memenuhi
Sebagai dari Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi

Pada Tanggal :
25 September 2019

Panitia Penguji
Ketua

Dra. Sulastiningsih. M.Si.

1. Anggota

Drs. Achmad Tjahjono, MM, Akt.

2. Anggota

Drs. H. Muda Setia Hamid, MM, Akt.

Mengesahkan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Widya Wiwaha Yogyakarta

Drs. Muhammad Subkhan, MM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan Yayasan Vesta Indonesia berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Yayasan Vesta Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan belum menggunakan pedoman yang berlaku untuk organisasi sektor publik. Salah satu cara agar laporan keuangan Yayasan Vesta Indonesia dapat mudah dipahami, relevan, dan memiliki daya banding yang tinggi, maka Yayasan Vesta Indonesia harus menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Adapun objek penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan Yayasan Vesta Indonesia. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan.

Hasil Penelitian ini adalah laporan keuangan Yayasan Vesta Indonesia berdasarkan pedoman PSAK No. 45 sesuai dengan informasi yang didapatkan.

Kata Kunci : *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, Laporan Keuangan, Organisasi Nirlaba*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan yang telah Tuhan berikan dalam berbagai wujud. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. Muhammad Subkhan, MM., selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Khoirunisa Cahya Firdarini, S.E, M.Si., selaku ketua jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Dra. Sulastiningsih, M.Si., selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu.
5. Yusuf Kusuma Nugroho S.Psi., selaku Direktur Yayasan Vesta Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Yayasan Vesta Indonesia.
6. Suryaningsih S.Ak., selaku teman diskusi dalam pengembangan pengetahuan dan kapasitas keilmuan Akuntansi.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 25 September 2019

Penulis

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Batasan Masalah.	5
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	5
BAB II.....	7

LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Organisasi Nirlaba	7
2.2 Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta	8
2.3 Laporan Keuangan.....	12
2.4 Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba	12
2.5 Yayasan.....	15
2.5.1 Pengertian Yayasan.....	15
2.5.2 Tujuan Yayasan	16
2.5.3 Karakteristik Yayasan.....	16
2.5.4 Laporan Keuangan Yayasan.....	17
2.5.5 Sumber Pembiayaan/Kekayaan	17
2.5.6 Pola Pertanggungjawaban Yayasan	18
2.5.7 Struktur Organisasi Yayasan	19
2.6 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45.....	20
2.6.1 Laporan Posisi Keuangan	20
2.6.2 Klasifikasi Aset dan Liabilitas.....	21
2.6.3 Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat.....	22
2.6.4 Laporan Aktivitas	23
2.6.5 Laporan Arus Kas	27
2.7 Definisi yang Digunakan Dalam PSAK No. 45	27

2.8 Contoh Format Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 45.....	29
2.8.1 Laporan Posisi Keuangan	29
2.8.2 Laporan Aktivitas.....	30
2.8.3 Laporan Arus Kas	36
BAB III	39
METODA PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Objek Penelitian.....	39
3.3 Sumber Data	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Metode Analisis Data.....	40
BAB IV	42
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Latar Belakang dan Sejarah Organisasi	42
4.2 Alamat Lokasi	44
4.3 Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi	45
4.3.1 Visi.....	45
4.3.2 Misi	45
4.3.3 Tujuan Organisasi	46
4.4 Tugas Pokok Organisasi.....	46

4.5 Program Pelayanan	47
4.6 Struktur Organisasi	47
4.7 Analisis Data	49
4.7.1 Elemen laporan keuangan bulanan Yayasan	50
4.7.2 Mendata asset yang dimiliki Yayasan Vesta Indonesia	51
4.7.3 Menilai asset yang dimiliki oleh Yayasan Vesta Indonesia	52
4.7.4 Menyusun laporan posisi keuangan (neraca) Yayasan Vesta Indonesia per 1 Januari 2018	53
4.7.5 Menyusun laporan aktivitas keuangan periode 2018	54
4.7.6 Menyusun laporan posisi keuangan (neraca) Yayasan Vesta Indonesia periode 31 Desember 2018	57
4.1.7 Menyusun laporan arus kas Yayasan Vesta Indonesia periode 2018	59
4.8 Pembahasan	60
BAB V	64
PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
Lampiran	67
Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian Yayasan Vesta Indonesia	68

Lampiran 2 : Daftar Pedoman Wawancara.....	69
Lampiran 3 : Laporan Keuangan Bulanan Yayasan Vesta Indonesia Periode Januari- Desember 2018	70
Lampiran 4 : Hasil rekomendasi penulis dalam penyusunan laporan aktivitas periode 31 Desember 2018	93
Lampiran 5 : Hasil rekomendasi penulis dalam penyusunan laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2018	95
Lampiran 6 : Hasil rekomendasi penulis dalam menyusun laporan arus kas periode 31 Desember 2018	96

STIE Widya Wiwana
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Contoh Laporan Posisi Keuangan	29
Tabel 2 : Contoh Laporan Posisi Keuangan	30
Tabel 3 : Contoh Laporan Aktivitas Bentuk B	32
Tabel 4 : Contoh Laporan Aktivitas Bentuk C (Bagian 1 dari 2 bagian)	33
Tabel 5 : Contoh laporan Aktivitas Bentuk C (Bagian 2 dari 2 Bagian)	34
Tabel 6 : Contoh Laporan Aktivitas Bentuk C bagian 2 dari 2 bagian (alternativ)	35
Tabel 7 : Contoh Laporan Arus Kas Metode Langsung	36
Tabel 8 : Contoh Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung	37

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi	48
Gambar 2 : Laporan posisi keuangan per 1 Januari 2018.....	54
Gambar 3 : Laporan Aktivitas Yayasan Vesta Indonesia	55
Gambar 4 : Laporan aktivitas berdasarkan PSAK No. 45	57
Gambar 5 : Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2018	57
Gambar 6 : Laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK No. 45.....	58
Gambar 7 : Laporan arus kas per 31 Desember 2018.....	59
Gambar 8 : Laporan arus kas berdasarkan PSAK No. 45.....	60

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bertujuan untuk memberikan jasa atau layanan yang tidak bertujuan untuk mencari laba (keuntungan) dari aktivitas operasionalnya. Seringkali sulit membedakan antara organisasi bisnis dan organisasi nirlaba dikarenakan kegiatannya yang hampir sama. Pada prinsipnya organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan bagian aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (Mahsun,dkk,2013:185). Pada umumnya, organisasi nirlaba dituntut untuk senantiasa menyiapkan rencana-rencana serta program penganggarnya secara berkesinambungan. Rencana program serta rencana penganggaran ini yang dituntut akan akuntabilitas serta transparasi yang memadai.

Laporan keuangan sangat penting bagi organisasi sektor publik. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola oleh manajemen. Laporan keuangan digunakan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja mnajrial dan organisasi. (Mahsun,dkk, 2013:18). Kualitas laporan keuangan harus memenuhi kriteria dasar dalam memberikan informasi yang dapat diandalkan dan relevan (Keating: 2003). Laporan keuangn organisasi nirlaba ini dibutuhkan sebagai informasi akuntansi bagi para pengguna, baik pihak internal maupun pihak eksternal, seperti donator, Yayasan, kreditur, anggota organisasi dan pihak lainnya untuk pengambilan keputusan. Organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan

keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya *true and fair presentation* (Mardiasmo, 2002:160-161).

Penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba mempunyai standar tersendiri, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Dengan adanya standar penyajian laporan keuangan PSAK No. 45, bisa membuat penyajian laporan keuangan di organisasi nirlaba menjadi seragam dalam pembuatannya. Penyajian laporan keuangan dengan standar PSAK No. 45 membuat laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparansi bagi para pengguna sehingga para pengguna ini dapat melihat aktivitas program yang telah dijalankan beserta anggaran yang telah dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana dari para donatur. Laporan keuangan organisasi nirlaba dengan standar PSAK No. 45 meliputi :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Aktivitas
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Namun, pada kenyataannya masih banyak organisasi sektor publik yang masih belum menggunakan pedoman/acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dipakai masih sangat sederhana, di mana organisasi tersebut tidak membuat laporan keuangan yang lengkap yang seharusnya digunakan pada organisasi sektor publik umumnya yang telah menerapkan pedoman PSAK No. 45.

Yayasan merupakan salah satu contoh organisasi sektor publik yang tidak mencari keuntungan atau laba pada setiap kegiatan organisasinya. Menurut UU No. 16 tahun 2001, sebagai dasar hukum positif Yayasan, Yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk

mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha (Bastian, 2007:1)

Vesta merupakan organisasi sektor publik yang berorientasi pada upaya pencegahan dan penanggulangan secara holistik dan komprehensif tentang Infeksi Menular Seksual dan Human Immuno Defisiensi Virus dikalangan orang muda. Pada tanggal 10 Januari 2005 dengan akte notaris no 11/10-01-2005, Vesta dikukuhkan sebagai lembaga yang berbadan hukum di kantor notaris Hj. Carlina Liestyani S.H di Yogyakarta. Tanggal 15 Februari 2004 secara resmi nama Vesta Indonesia dikukuhkan sebagai nama lembaga untuk memayungi kegiatan-kegiatan bergerak di bidang HIV/AIDS.

Pada perkembangannya Yayasan Vesta melakukan kegiatan bukan saja pada masyarakat LSL tetapi juga pada kelompok orang muda dan dewasa lainnya yang merupakan kelompok berperilaku berisiko tinggi, misalnya crew bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi), AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi), sopir taxi, tukang ojek, anggota TNI, anggota POLRI, dan wanita pekerja seks (WPS). Perubahan perilaku dari perilaku yang berisiko tertular IMS dan atau HIV menjadi perilaku yang aman tidak berisiko tertular IMS dan atau HIV merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam program intervensi perubahan perilaku (IPP) di Yayasan Vesta Indonesia.

Pada awal tahun 2014 Vesta melihat persoalan kesehatan masyarakat tentang HIV dan AIDS tidak hanya terbatas pada persoalan penularan HIV saja, tetapi lebih luas lagi misalnya penanganan pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS), pencegahan penyakit lain yang terkait erat dengan HIV dan AIDS, dll. Mempertimbangkan hal

tersebut maka pada awal tahun 2014 Vesta memutuskan untuk mengembangkan dan meluaskan program kegiatannya meliputi penanggulangan IMS, HIV, AIDS secara menyeluruh dan isu lain yang lebih luas di dalam kesehatan masyarakat yang terkait erat dengan HIV dan AIDS.

Menyesuaikan pada kondisi yang terus berkembang tersebut pada bulan Oktober 2015 Vesta melakukan pembaharuan pada akte pendiriannya yang kemudian secara resmi berdiri sebagai sebuah Yayasan dengan nama Vesta Indonesia yang dikukuhkan dengan akta pendirian nomor 11 tertanggal 24 Oktober 2015 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020403.AH.01.04. Tahun 2015 tertanggal 2 November 2015.

Walaupun tujuan organisasi nirlaba sepenuhnya untuk melayani masyarakat, tidak berarti bahwa organisasi ini terlepas dari tanggungjawab sebagai suatu badan ekonomi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dibidang keuangan yang meliputi transaksi keuangan mengenai sumber daya, pendapatan, dan beban, maka laporan keuangan merupakan suatu informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan/pengguna laporan keuangan seperti: donatur, investor, kreditur, anggota organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Dalam pertanggungjawaban sebagai suatu badan ekonomi, Yayasan Vesta Indonesia tidak menggunakan pedoman PSAK No. 45 dalam pembuatan laporan keuangan. Yayasan Vesta Indonesia hanya membuat laporan keuangan yang masih sangat sederhana.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Vesta Indonesia Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45”**

1.2 Rumusan Masalah

Penyusunan laporan keuangan Yayasan Vesta Indonesia belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah: Bagaimana penyusunan laporan keuangan Yayasan Vesta Indonesia tahun 2018 berdasarkan PSAK No. 45?

1.4 Batasan Masalah.

Penelitian ini hanya menyusun laporan keuangan tahun 2018 pada Yayasan Vesta Indonesia yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas yang dibutuhkan oleh Yayasan Vesta Indonesia.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mengevaluasi penyusunan laporan keuangan Yayasan Vesta Indonesia berdasarkan PSAK No. 45.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang berkaitan dengan menyusun laporan keuangan pada organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penelitian selanjutnya : diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bentuk laporan keuangan pada organisasi nirlaba yang

sesuai dengan PSAK No. 45 serta menambah wawasan, perbandingan, dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya, maupun pihak lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

- b. Bagi Organisasi Nirlaba : hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan tentang pentingnya laporan keuangan dan bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Organisasi Nirlaba

Akuntansi Sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh Lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. (Renyowijoyo, 2008:2). Menurut Halim (2012:3) akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 adalah organisasi yang memperoleh sumber daya dari para anggota dan dari para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Organisasi sektor publik menjadi berbeda dan unik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Nordiawan, 2006:2) :

1. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial.
2. Dimiliki secara kolektif oleh publik.
3. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjual-belikan.
4. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus.

Menurut Mahsun (2007:215), organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan menumpuk keuntungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Organisasi nirlaba seringkali memfokuskan sumber dayanya kepada pelayanan tertentu, dengan inti yang berlapis dari dalam ke luar, berturut-turut melalui (Mahsun, 2011:188) : (1) falsafah pelayanan, (2) budaya pelayanan, (3) citra pelayanan, (4) manajemen pelayanan, (5) alasan pelayanan, (6) siapa yang dilayani, (7) apa bentuk pelayanan, di amana, kapan, dan bagaimana cara melayani.

2.2 Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Secara umum, yang membedakan secara signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan adalah (Nordiawan, 2006:3) :

1. Tujuan Organisasi

Perusahaan komersial bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan, sedangkan organisasi sektor publik

mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Dengan kata lain, perusahaan merupakan organisasi yang dijalankan untuk mencari laba atau profit (*profit – oriented*), sedangkan organisasi sektor publik merupakan organisasi yang dijalankan bukan untuk mencari laba (*non-profit-oriented*).

2. Sumber-sumber Pendanaan

Perusahaan komersial didanai melalui hasil operasional perusahaan bersangkutan selain investasi dari pemegang saham. Sementara itu, sesuai dengan tujuan, organisasi sektor publik mendanai operasionalnya tidak melalui laba operasi tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Di organisasi pemerintahan cara seperti ini direalisasikan melalui pembayaran pajak atau retribusi. Bagi pemerintah daerah, termasuk sumber pendanaan adalah sumbangan/subsidi dari pemerintah pusat. Di organisasi sektor publik lain sumber pendanaan bisa berupa iuran anggota, subsidi, atau sumbangan dari donatur.

3. Peraturan Perundangan

Organisasi sektor publik khususnya lembaga pemerintahan harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah Indonesia misalnya, harus melakukan pembangunan jembatan karena diamanatkan dalam UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun pembangunan jembatan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi organisasi pemerintah yang bersangkutan.

Menurut Mardiasmo (2002:8-13), perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu :

1. Tujuan Organisasi

Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimalkan laba (*profit motiv*), sedangkan pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimalkan laba tetapi pemberian pelayanan publik (*publik service*), seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya: penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat).

2. Sumber Pembiayaan

Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau struktur pembiayaan. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak, retribusi, *charging for services*, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri, dan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Sumber pembiayaan pada sektor swasta lebih fleksibel dan memiliki variasi yang lebih banyak. Pada sektor swasta sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri dari atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan (*retained earnings*) dan modal pemilik. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan pemberian saham baru untuk mendapatkan dana dari publik.

3. Pola Pertanggungjawaban

Manajemen pada sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditur atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (*public funds*). Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah daerah atasan atau kepada pemerintah pusat kepada parlemen. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen paling penting dari proses akuntabilitas publik.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor swasta dapat berbentuk data, pyramid, lintas fungsional (*cross functional*), dan lainnya sesuai dengan pilihan organisasi. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik.

5. Karakteristik Anggaran dan Stakeholder

Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan.

Anggaran bukan sebagai rahasia negara. Sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan.

6. Sistem Akuntansi

Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual (*accrual accounting*), sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (*cash accounting*).

2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemilik atau pihak lainnya (Suwardjono, 2002:56). Laporan keuangan adalah hasil dari suatu pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan (Yudianti, 1996).

Laporan keuangan sangat penting bagi para organisasi sektor publik, karena laporan keuangan ini nantinya akan dipakai para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan dan laporan keuangan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban manajemen atas dana yang dikelola. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat diandalkan (Keating: 2003). Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik (Nordiawan, 2006:131).

2.4 Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajrial dan organisasi. Sedangkan dari sisi

pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Mahsun, dkk, 2013:18). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 adalah (Mardiasmo dalam Mahsun, dkk, 2013:188-189) :

1. Laporan keuangan organisasi non bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.

6. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
7. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

Menurut PSAK No. 45 (paragraph 6), tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.

Pihak pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan Bersama dalam rangka menilai (PSAK No. 45, Paragraf 7):

- a. Jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.
- b. Cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek lain dari kinerjanya.

Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai (PSAK No. 45, paragraph 8):

1. Jumlah dan sifat asset, liabilitas, dan asset neto entitas nirlaba.
2. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat asset neto.
3. Jenis dan jumlah arus kas masuk dan kas keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya.
4. Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya.

5. Usaha jasa entitas nirlaba.

2.5 Yayasan

2.5.1 Pengertian Yayasan

Menurut UU No. 16 tahun 2001, sebagai dasar hukum positif Yayasan, pengertian Yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan hukum (Bastian, 2007:1).

Yayasan berbeda dengan perkumpulan karena perkumpulan memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu meliputi sesuatu persekutuan, koperasi, dan perkumpulan saling menanggung (Bastian, 2007:1). Selanjutnya, perkumpulan terdiri atas 2 jenis, yaitu: (a) perkumpulan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan perkumpulan yang saling menanggung; (b) perkumpulan yang tidak berbentuk badan hukum, seperti persekutuan perdata, CV, dan Firma (Bastian, 2007:1).

Di pihak lain, Yayasan merupakan bagian dari perkumpulan yang berbentuk Badan Hukum dengan definisi yang dinyatakan dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu suatu badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dengan tidak mempunyai anggota (Bastian, 2007:2).

Yayasan sulit dibedakan dengan Lembaga lainnya yang berorientasi laba. Bentuk hukum Yayasan telah dijadikan payung untuk menyiasati berbagai aktivitas di luar bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, kesehatan, serta pendidikan dan persoalan ini

telah mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama pihak perpajakan (Bastian, 2007:1).

2.5.2 Tujuan Yayasan

Setiap organisasi, termasuk Yayasan, memiliki tujuan yang spesifik dan unik yang dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan yang bersifat kuantitatif mencakup pencapaian laba maksimum, penguasaan pangsa pasar, pertumbuhan organisasi, dan produktivitas. Sementara, tujuan kualitatif dapat disebutkan sebagai efisiensi dan efektifitas organisasi, manajemen organisasi yang Tangguh, moral karyawan yang tinggi, reputasi organisasi, stabilitas, pelayanan kepada masyarakat, dan citra perusahaan (Bastian, 2007:2).

Menurut UU no. 16 tahun 2001, Yayasan mempunyai fungsi sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan berdasarkan undang-undang (Bastian, 2007:3).

2.5.3 Karakteristik Yayasan

Menurut Bastian (2010:406), karakteristik utama organisasi nirlaba seperti Yayasan, dapat dibedakan dengan organisasi bisnis. Perbedaannya terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya awal yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi seperti Yayasan umumnya memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Pada Yayasan dimana tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasionalnya dari pendapatan atau jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah dan kepastian aliran masuk kas menjadi ukuran yang penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditor dan pemasok lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya.

2.5.4 Laporan Keuangan Yayasan

Menurut Bastian (2007:73), laporan keuangan Yayasan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sumber daya Yayasan berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan kalau suatu Yayasan menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik Yayasan tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan, dalam artian bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya Yayasan pada saat likuidasi pembubaran.

2.5.5 Sumber Pembiayaan/Kekayaan

Menurut Bastian (2007:4), sumber pembiayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, Yayasan juga memperoleh sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, seperti berupa:

- a. Wakaf

- b. Hibah
- c. Hibah wasiat
- d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat adalah sumbangan atas bantuan sukarela yang diterima Yayasan, baik dari negara, bantuan luar negeri, masyarakat, maupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “perolehan lain” misalnya adalah deviden, Bunga tabungan bank, sewa Gedung, dan perolehan dari hasil usaha yayasan.

Jika kekayaan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Kekayaan Yayasan yang dimiliki tersebut dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Dalam hal tertentu, negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan.

2.5.6 Pola Pertanggungjawaban Yayasan

Menurut Bastian (2007:4), dalam Yayasan, pengelola (pengurus dan pengawas) bertanggung jawab kepada Pembina yang disampaikan dalam Rapat Pembina yang diadakan setahun sekali. Pola pertanggungjawaban di Yayasan bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban Yayasan kepada pembina. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen paling penting dari proses akuntabilitas publik.

Pertanggungjawaban manajemen (*managerial accountability*) merupakan bagian terpenting bagi kredibilitas di Yayasan. Tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban tersebut dapat menimbulkan implikasi yang luas (Bastian, 2007:4)

2.5.7 Struktur Organisasi Yayasan

Menurut undang-undang No. 16 tahun 2001, Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-undang tersebut atau Anggaran Dasar. Kewenangan Pembina meliputi (Bastian, 2007:5) :

- a. Membuat keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus serta pengawas.
- c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan.
- d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
- e. Membuat keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Pembina adalah individu pendiri Yayasan dan/atau mereka yang, berdasarkan keputusan rapat anggota, dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan, dan pihak yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah individu yang mampu melakukan pembuatan hukum. Selain itu, pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan (indra Bastian, 2007:5).

1. Karakteristik Anggaran Yayasan

Dilihat dari karakteristik anggaran, rencana anggaran Yayasan dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran tidak boleh menjadi rahasia internal Yayasan yang bersangkutan dan harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran Yayasan merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Bastian, 2007:5).

Anggaran pada Yayasan berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja menurut satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan Yayasan yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang dilakukan di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam periode mendatang (Bastian, 2007:6).

2.6 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45

Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan (2011:Paragraf 9).

2.6.1 Laporan Posisi Keuangan

a) Tujuan Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai asset, liabilitas, dan asset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam pengungkapan laporan keuangan lain

dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak diharapkan pembayaran kembali, anggota kreditur, dan pihak lain untuk menilai (2011:Paragraf 10) :

- a. Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan.
- b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan mencakup entitas organisasi nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total asset, liabilitas, dan asset neto (2011:Paragraf 11).

2.6.2 Klasifikasi Aset dan Liabilitas

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan, mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara asset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan asset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relative homogen. Sebagai contoh entitas nirlaba biasanya melaporkan masing-masing unsur asset dalam kelompok yang homogen, seperti (2011:Paragraf 12) :

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain
- c. Persediaan
- d. Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar dimuka
- e. Instrument keuangan dan informasi jangka panjang
- f. Tanah, gedung, peralatan, serta asset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa

Kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terkait penggunaannya.

Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut (2011:Paragraf 13) :

- a. Menyajikan aset berdasar urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo.
- b. Mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh tempo liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, dalam catatan atas laporan keuangan.

2.6.3 Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat (2011:Paragraf 14).

Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan (2011:Paragraf 15).

Pembatasan permanen atas aset, seperti tanah atau karya seni, yang diberikan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak dijual; atau aset yang diberikan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara

permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (2011:Paragraf 16).

Pembatasan temporer terhadap sumber daya berupa aktivitas operasi tertentu; investasi untuk jangka waktu tertentu; penggunaan selama periode tertentu dimasa depan; atau pemerolehan asset tetap; dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok neto yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali dapat terbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya (2011:Paragraf 17).

Asset neto tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan deviden atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan asset neto tidak terikat dapat berasal dari sifat entitas nirlaba. Informasi mengenai Batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (2011:Paragraf 18).

2.6.4 Laporan Aktivitas

a) Tujuan Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dari peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat asset neto; hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan Bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan kembali, anggota,

kreditur dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja suatu periode; menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa; dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer (2011:Paragraf 19).

Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah asset neto selama suatu periode. Perubahan asset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada asset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan (2011:paragraf 20).

b) Perubahan Kelompok Aset Neto

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan asset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode (2011:Paragraf 21).

Pendapatan dan keuntungan yang menambah asset neto, serta beban dan kerugian yang mengurangi asset neto dikelompokkan sebagaimana diatur di paragraf 24-25 (2011:Paragraf 22).

c) Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah asset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, dan menyajikan beban sebagai pengurang asset neto tidak terikat (2011:Paragraf 23).

Sumber daya disajikan sebagai penambah asset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat kontemporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumber daya terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang

sama, dapat disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi (2011:Paragraf 24).

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan asset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang asset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi (2011:Paragraf 25).

Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam kelompok asset neto tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Misalnya, dalam suatu kelompok atau beberapa kelompok perubahan dalam asset neto, entitas nirlaba dapat mengklasifikasikan unsur-unsurnya menurut kelompok operasi atau nonoperasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau tidak berulang, atau dengan cara lain (2011:Paragraf 26).

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK ETAP (2011:Paragraf 27).

Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi *incidental* atau peristiwa lain yang berasal di luar pengendalian entitas nirlaba dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjual tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi (2011:Paragraf 28).

d) Informasi Pemberi Jasa

Laporan aktivitas atau catatan laporan keuangan menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung (2011:Paragraf 29).

Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Di samping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, entitas nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya, misalnya gaji, listrik, bunga, dan penyusutan (2011:Paragraf 30).

Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama (2011:Paragraf 31).

Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas-aktivitas manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya, dan semua aktivitas manajemen dan administrasi kecuali program pemberian jasa atau pencarian dana. Aktivitas pencarian dana meliputi publikasi dan kampanye pencarian dana; pengadaan daftar alamat penyumbang; pelaksanaan acara khusus pencarian dana; pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lainnya; dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah dan lain-lain. Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis (2011:Paragraf 32).

2.6.5 Laporan Arus Kas

a) Tujuan Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode (2011:Paragraf 33).

b) Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 (revisi 2009): Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini (2011:Paragraf 34) :

1) Aktivitas Pendanaan:

- (i) Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.
- (ii) Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi.
- (iii) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

2) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas, misalnya sambungan berupa bangunan atau asset investasi.

2.7 Definisi yang Digunakan Dalam PSAK No. 45

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini (2011:Paragraf 05):

1. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba

diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

2. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
3. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
4. Sumber daya tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

2.8 Contoh Format Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 45

2.8.1 Laporan Posisi Keuangan

Tabel 1 : Contoh Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS NIRLABA		
Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20X2 dan 20X1 (dalam jutaan rupiah)		
ASET	20X2	20X1
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	188.000	1.150
Piutang bunga	5.325	4.175
Persediaan dan biaya dibayar dimuka	1.525	2.500
Piutang lain-lain	7.562	6.750
Investasi jangka pendek	3.500	2.500
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti Investasi	13.025	11.400
Aset tetap	154.250	158.975
Investasi jangka panjang	545.175	508.750
<i>Jumlah Aset</i>	<u>730.550</u>	<u>696.200</u>
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Utang dagang	6.425	2.625
Pendapatan diterima dimuka yang dapat dikembalikan	-	1.625
Utang lain-lain	2.187	3.250
Utang wesel	-	2.850
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Kewajiban tahunan	4.213	4.250
Utang jangka panjang	13.750	16.250
<i>Jumlah Liabilitas</i>	<u>26.575</u>	<u>30.850</u>
ASET NETO		
Tidak terikat	288.070	259.175
Tidak terikat temporer (Catatan B)	60.855	63.675
Tidak terikat temporer (Catatan C)	355.050	342.500
<i>Jumlah aset neto</i>	<u>703.975</u>	<u>665.350</u>
Jumlah liabilitas dan aset neto	<u>730.550</u>	<u>696.200</u>

Sumber : PSAK No. 45 Revisi 2011

2.8.2 Laporan Aktivitas

a. Bentuk A

Bentuk A menyajikan informasi dalam kolom tunggal. Bentuk A ini memudahkan penyusunan laporan aktivitas komparatif.

Tabel 2 : Contoh Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS NIRLABA Laporan Aktivitas untuk tahun berakhir Pada 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)	
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT	
<i>Pendapatan</i>	
Sumbangan	21.600
Jasa layanan	13.500
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E)	14.000
Penghasilan investasi lain-lain (Catatan E)	2.125
Penghasilan neto investasi jangka panjang belum terealisasi	20.570
Lain-lain	375.000
Jumlah	72.170
<i>Aset Neto yang Berakhir Pembatasannya (Catatan D):</i>	
Pemenuhan program pembatasan	29.975
Pemenuhan pembatasan perolehan peralatan	3.750
Berakhirnya pembatasan waktu	3.125
Jumlah	36.850
Jumlah Pendapatan	109.020
<i>Beban</i>	
Program A	32.750
Program B	21.350
Program C	14.400
Manajemen dan umum	6.050
Pencairan dana	5.375
Jumlah Beban (Catatan F)	79.925
Kerugian akibat kebakaran	200.000
Jumlah	80.125
Kenaikan aset neto tidak terikat	28.895
ASET NETO TERIKAT TEMPORER	
Sumbangan	20.275
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E)	6.450
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang (Catatan E)	7.380
Kerugian aktuarial untuk kewajiban umum	(75)
Aset neto terbebaskan dari pembatasan (Catatan D)	(36.380)
Penurunan aset neto terikat temporer	(2.820)
	<i>berlanjut..</i>

<i>Selanjutnya...</i>	
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN	
Sumbangan	700
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E)	300
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang (Catatan E)	11.550
<i>Kenaikan aset neto terikat permanen</i>	12.550
KENAIKAN ASET NETO	38.625
ASET NETO AWAL TAHUN	665.350
ASET NETO AKHIR TAHUN	703.975

Sumber : PSAK No. 45 Revisi 2011

b. Bentuk B

Bentuk B menyajikan pembuktian dampak berakhirnya pembatasan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali aset tertentu terhadap reklasifikasi aset neto. Bentuk B memungkinkan penyajian informasi mengenai sumbangan dan penghasilan dari investasi

Tabel 3 : Contoh Laporan Aktivitas Bentuk B

ENTITAS NIRLABA				
Laporan Aktivitas untuk tahun berakhir Pada 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)				
	Tidak Terikat	Terikat Temporer	Terikat Permanen	Jumlah
PENDAPATAN				
Sumbangan	21.600	20.275	700.000	42.575
Jasa layanan	13.500	-	-	13.500
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E)	14.000	6.450	300.000	20.750
Penghasilan investasi lain (Catatan E)	2.125	-	-	2.125
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang (Catatan E)	20.570	7.380	11.550	39.500
Lain-lain	375	-	-	-
ASET NETO YANG BERAKHIR PEMBATASANNYA (CATATAN D)				
Pemenuhan program pembatasan	29.975	(29.975)	-	-
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan	3.750	(3.750)	-	-
Berakhirnya pembatasan waktu	3.125	(3.125)	-	-
<i>Jumlah Pendapatan</i>	109.020	(2.745)	12.55	118.45
BEBAN				
Program A	32.750	-	-	32.750
Program B	21.350	-	-	21.350
Program C	12.400	-	-	12.400
Manajemen dan umum	6.050	-	-	6.050
Pencarian dana	5.375	-	-	5.375
<i>Jumlah beban (Catatan F)</i>	79.925	-	-	79.925
Kerugian akibat kebakaran	200	-	-	200
Kerugian aktuarial dan kewajiban tahunan	-	75	-	75
<i>Jumlah beban</i>	80.125	75	-	80.200
PERUBAHAN ASET NETO	28.895	(2.820)	12.55	38.625
ASET NETO AWAL TAHUN	259.175	63.675	342.5	665.35
ASET NETO AKHIR TAHUN	288.070	60.855	355.05	703.975

Sumber : PSAK No. 45 Revisi 2011

c. Bentuk C

Bentuk C menyajikan informasi dalam dua laporan dengan jumlah ringkasan dari laporan pendapatan, beban, dan perubahan terhadap aset neto tidak terikat disajikan dalam laporan perubahan aset neto. Pendekatan bentuk C ini menitikberatkan perhatian pada perubahan aset neto tidak terikat. Bentuk ini sesuai untuk entitas nirlaba yang memandang aktivitas operasi sebagai aktivitas yang terpisah dari penerimaan pendapatan terikat dari sambungan investasi.

Tabel 4 : Contoh Laporan Aktivitas Bentuk C (Bagian 1 dari 2 bagian)

ENTITAS NIRLABA	
Laporan pendapatan, beban, dan perubahan aset neto tidak terikat Untuk tahun berakhir Pada 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)	
PENDAPATAN TIDAK TERIKAT	
Sumbangan	21.600
Jasa layanan	13.500
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E)	14.000
Penghasilan investasi lain (Catatan E)	2.125
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang (Catatan E)	20.570
Lain-lain	375
Jumlah	72.170
ASET NETO YANG DIBEBASKAN DARI PEMBATASAN (CATATAN D)	
Penyelesaian program pembatasan	29.975
Penyelesaian pembatasan perolehan peralatan	3.750
Berakhirnya pembatasan waktu	3.125
Jumlah	36.850
Jumlah Pendapatan	109.020
Beban	
Program A	32.750
Program B	21.350
Program C	12.400
Manajemen dan umum	6.050
Pencarian dana	5.375
Jumlah beban (Catatan F)	79.925
Kerugian akibat kebakaran	200
Jumlah beban tidak terikat	80.125
KENAIKAN ASET NETO TIDAK TERIKAT	28.895

Sumber : PSAK No. 45 Revisi 2011

d. Bentuk C (Bagian 2 dari 2 bagian)

Tabel 5 : Contoh laporan Aktivitas Bentuk C (Bagian 2 dari 2 Bagian)

ENTITAS NIRLABA	
Laporan perubahan aset neto untuk tahun berakhir Pada 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)	
ASET NETO TIDAK TERIKAT	
Jumlah pendapatan tidak terikat	72.170
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (Catatan D)	36.850
Jumlah beban tidak terikat	(80.125)
<i>Kenaikan aset neto tidak terikat</i>	<u>28.895</u>
ASET NETO TERIKAT TEMPORER	
Sumbangan	20.570
Penghasilan dari investasi jangka panjang (catatan E)	6.450
Penghasilan neto dari investasi jangka panjang yang telah direalisasi dan belum terealisasi (catatan E)	7.380
Kerugian akrual dari kewajiban tahunan	(75)
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (Catatan D)	(36.850)
<i>penurunan aset neto terikat temporer</i>	<u>(2.820)</u>
ASET NETO TERIKAT PERMANEN	
Sumbangan	700
Penghasilan dari investasi jangka panjang (catatan E)	300
Penghasilan neto dari investasi jangka panjang yang telah direalisasi dan belum terealisasi (catatan E)	11.550
<i>Kenaikan aset neto terikat permanen</i>	<u>12.550</u>
KENAIKAN ASET NETO	38.625
KENAIKAN ASET NETO PADA AWAL TAHUN	665.350
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	<u>703.975</u>

Sumber : PSAK No. 45 Revisi 2011

e. Bentuk C Bagian 2 dari 2 Bagian (alternative)

Tabel 6 : Contoh Laporan Aktivitas Bentuk C bagian 2 dari 2 bagian (alternativ)

ENTITAS NIRLABA				
Laporan perubahan aset neto				
Untuk tahun berakhir Pada 31 Desember 20X2				
(dalam jutaan rupiah)				
PENDAPATAN				
Pendapatan terikat	72.170			72.170
Pendapatan tidak terikat		20.275	700	20.975
Pendapatan investasi jangka panjang (catatan E)		6.450	300	6.750
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang (catatan E)		7.380	11.550	18.930
Aset neto yang dibebaskan pembatasannya (catatan D)	36.850	(36.850)		
<i>Jumlah pendapatan</i>	109.020	(2.745)	12.550	118.825
BEBAN				
Beban tidak terikat	80.125			80.125
Kerugian aktuarial dari kewajiban tahunan		75		75
<i>Jumlah beban</i>	80.125	75		80.200
PERUBAHAN ASET NETO	28.895	(2.820)	12.550	38.625
ASET NETO AWAL TAHUN	259.175	63.675	342.500	665.350
ASET NETO AKHIR TAHUN	288.070	60.855	355.855	703.975

Sumber : PSAK No. 45 Revisi 2011

2.8.3 Laporan Arus Kas

a. Metode Langsung

Tabel 7 : Contoh Laporan Arus Kas Metode Langsung

ENTITAS NIRLABA	
Laporan arus kas untuk tahun berakhir Pada 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)	
AKTIVITAS OPERASI	
Kas dan pendapatan jasa	13.050
Kas dan pemberi sumber daya	20.075
Kas dari piutang lain-lain	6.537
Bunga dan deviden yang diterima	21.425
Penerimaan lain-lain	375.000
Bunga yang dibayarkan	(955)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier	(59.520)
Utang lain-lain yang dilunasi	(1.062)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi</i>	<i>(75)</i>
AKTIVITAS INVESTASI	
Ganti rugi asuransi kebakaran	625
Pembelian peralatan	(3.750)
Penerimaan dan penjualan investasi	190.250
Pembelian investasi	(187.250)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi</i>	<i>(125)</i>
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan dan kontribusi terbatas dari:	
Investasi dalam endowment	500
Investasi dalam endowment berjangka	175
Investasi bangunan	3.025
Investasi perjanjian tahunan	500
	4.200
Aktivasi pendanaan lain:	
Bunga dan deviden terbatas untuk reinvestasi	750
Pembayaran kewajiban tahunan	(362)
Pembayaran utang wesel	(2.850)
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(2500)
	(4.962)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivasi pendanaan</i>	<i>(762)</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	(962)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.150
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	118
<i>Rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivasi operasi:</i>	
Perubahan dalam aset neto	38.625
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:	
Depresiasi	8000
	<i>Berlanjut,,,</i>

<i>Selanjutnya,,,</i>	
Kerugian akibat kebakaran	200
Kerugian aktuarial pada kewajiban tahunan	75
Kenaikan piutang bunga	(1.150)
Penurunan dalam persediaan dan biaya dibayar dimuka	975
Kenaikan dalam piutang lain-lain	(813)
Kenaikan dalam utang dagang	3.800
Penurunan dalam penerimaan dimuka yang dapat dikembalikan	(1.625)
Penurunan dalam utang lain-lain	(1.062)
Sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang	(6.850)
Bunga dan deviden terikat untuk investasi jangka panjang	(750)
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari jangka panjang	(39.500)
<i>Kas neto diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi</i>	(75)
<i>Data tambahan untuk aktivitas investasi dan pendanaan nonkas:</i>	
<i>Peralatan yang diterima sebagai hibah</i>	350
<i>Pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan</i>	200

Sumber : PSAK No. 45 Revisi 2011

c. Metode Tidak Langsung

Tabel 8 : Contoh Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung

ENTITAS NIRLABA	
Laporan arus kas untuk tahun berakhir Pada 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)	
AKTIVITAS OPERASI	
Rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivasi operasi:	
Perubahan dalam aset neto	38.625
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:	
Depresiasi	8000
Kerugian akibat kebakaran	200
Kerugian aktuarial pada kewajiban tahunan	75
Kenaikan piutang bunga	(1.150)
Penurunan dalam persediaan dan biaya dibayar dimuka	975
Kenaikan dalam piutang lain-lain	(813)
Kenaikan dalam utang dagang	3.800
Penurunan dalam penerimaan dimuka yang dapat dikembalikan	(1.625)
Penurunan dalam utang lain-lain	(1.062)
Sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang	(6.850)
Bunga dan deviden terikat untuk investasi jangka panjang	(750)
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari jangka panjang	(39.500)
<i>Kas neto diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi</i>	(75)
	<i>Berlanjut,,,</i>

<i>Selanjutnya,,,</i>	
AKTIVITAS INVESTASI	
Ganti rugi asuransi kebakaran	(825)
Pembelian peralatan	(3.750)
Penerimaan dan penjualan investasi	190.250
Pembelian investasi	(187.250)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi</i>	<u>(125)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan dan kontribusi terbatas dari:	
Investasi dalam endowment	500
Investasi dalam endowment berjangka	175
Investasi bangunan	3.025
Investasi perjanjian tahunan	500
	<u>4.200</u>
Aktivasi pendanaan lain:	
Bunga dan deviden terbatas untuk reinvestasi	750
Pembayaran kewajiban tahunan	(362)
Pembayaran utang wesel	(2.850)
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(2500)
	<u>(4.962)</u>
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivasi pendanaan</i>	<u>(762)</u>
PENURINAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	(962)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.050
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	185
<i>Data tambahan</i>	
<i>Aktivitas investasi dan pendanaan nonkas:</i>	
<i>Peralatan yang diterima sebagai hibah</i>	350
<i>Pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan</i>	200
<i>Bunga yang dibayarkan</i>	955

Sumber : PSAK No. 45 Revisi 2011

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa studi kasus yang merupakan penelitian menggunakan satu objek tertentu untuk diteliti, yaitu di Yayasan Vesta Indonesia. Kemudian data yang diolah berupa laporan keuangan bulanan Yayasan Vesta Indonesia yang sebenarnya adalah semacam buku kas untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan penyajian dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan Yayasan Vesta Indonesia tahun 2018 sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas.

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer, yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan sumber yang ada dalam organisasi yang berupa informasi keuangan dan gambaran umum.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, misal dari studi pustaka, literatur-literatur dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data secara langsung (personal interview) dengan melakukan komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Sumarni, 2006:85). Misalnya bertanya langsung atau tanya jawab dengan pihak Yayasan diantaranya, yaitu pimpinan Yayasan untuk mengetahui gambaran umum Yayasan, visi misi, kegiatan/program Yayasan, struktur organisasi Yayasan, serta wawancara dengan bagian bendahara untuk menanyakan laporan keuangan Yayasan Vesta Indonesia serta apa saja yang terdapat dalam laporan keuangan Yayasan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan mengutip data dari dokumen yang berasal dari Yayasan Vesta Indonesia meliputi gambaran umum Yayasan, struktur organisasi, dan laporan keuangan bulanan Yayasan Vesta Indonesia.

3.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti.

Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi laporan keuangan bulanan Yayasan Vesta Indonesia diawali dengan analisis terhadap objek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal kebijakan akuntansi dengan mengkombinasikan unsur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45

tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Tujuan utama laporan keuangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba (2011:Paragraf 6). Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 meliputi :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Aktivitas
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berikut adalah langkah-langkah yang dipakai oleh penulis untuk menyusun laporan keuangan Yayasan Vesta Indonesia periode 2018:

1. Mengamati laporan keuangan yang ada periode 2018 (Laporan keuangan bulanan Yayasan Vesta Indonesia)
2. Mendata asset yang dimiliki oleh Yayasan Vesta Indonesia
3. Menilai asset yang dimiliki oleh Yayasan Vesta Indonesia
4. Menyusun laporan posisi keuangan (neraca) Yayasan Vesta Indonesia per januari 2018.
5. Menyusun laporan aktivitas Yayasan Vesta Indonesia periode 2018.
6. Menyusun laporan posisi keuangan (neraca) Yayasan Vesta Indonesia periode 2018.